

Meneliti dan Berkolaborasi Melalui Belajar Bersama Komunitas¹

Heru Purwandari



Divisi Kependudukan, Agraria dan Ekologi Politik
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia
Institut Pertanian Bogor

¹ Hasil pemikiran, disampaikan untuk persiapan program MBKM Mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat-Fakultas Ekologi Manusia-IPB, 3 Agustus 2021

Meneliti dan Berkolaborasi Melalui Belajar Bersama Komunitas¹

Heru Purwandari²

Pada hari Kamis, 22 Juli 2021 telah berlangsung sebuah agenda seminar dengan tajuk “Peluang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Desa Adat di Sekitar KPH Konservasi Pati-Barat” yang diinisiasi oleh Departemen SKPM-FEMA, IPB dan KPH Konservasi Kehati. Semangat yang diusung oleh dua lembaga ini adalah membangun jejaring kolaborasi riset dan kerja pengabdian yang dapat diikuti baik oleh dosen dan mahasiswa berbagai jenjang (Sarjana dan Pasca Sarjana) di lingkungan Departemen SKPM, dengan melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama.

Sebelum melangkah lebih jauh merumuskan agenda kegiatan yang akan didesain bersama, memahami kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi hal penting. Keberadaan KPH merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi. Kegiatan Utama KPH yaitu mewujudkan peningkatan kelestarian dan fungsi hutan secara ekonomis, ekologi dan sosial melalui perbaikan tata kelola hutan. Kegiatan tersebut dikembangkan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. *Perencanaan*; inventarisasi potensi kawasan, zonasi, dan rencana pengelolaan.
2. *Perlindungan*; menjamin keberlanjutan proses ekologis, dan mengawasi kegiatan yang dapat merubah potensi kawasan.
3. *Pengawetan*; menjamin ekosistem berkembang dan berubah secara alami.
4. *Pemanfaatan*; pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
5. *Evaluasi kesesuaian fungsi*; mengembalikan fungsi kawasan yang berubah akibat konflik.

Data tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat 169 KPH. KPH terdiri dari beberapa lokus tanggung jawab kegiatan diantaranya adalah KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi), KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung), dan KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi). KPHK merupakan wilayah pengelolaan hutan yang seluruh atau sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan konservasi yang dikelola secara efisien untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman hayati dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara lestari. Secara wilayah kerja, KPHK berada pada kawasan Taman Nasional (TN), juga bisa berada pada Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Sebagai lembaga pengelolaan kehutanan yang aktivitasnya langsung bersinggungan dengan komunitas, KPHK menjalankan peran yang strategis tidak hanya menjaga ekosistem melainkan harus mampu melibatkan masyarakat sekitar dalam pencapaian tujuan tersebut sekaligus mendesain aktivitas ekonomi yang menguntungkan masyarakat. Dengan demikian, peran yang dapat dilakukan oleh KPHK diantaranya adalah;

1. **Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat.** Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu merumuskan pengembangan desa konservasi, pemberian akses untuk memungut hasil hutan, membangun fasilitas kemitraan antara KPHK dan masyarakat, serta mendorong pemberian izin perusahaan jasa wisata alam.
2. **Pembentukan dan Pengembangan Daerah Penyangga.** Membangun pemahaman masyarakat tentang konservasi merupakan kewajiban yang juga harus dijalankan oleh KPHK. Seiring dengan

¹ Disampaikan pada 3 Agustus 2021 untuk persiapan program MBKM Mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.

² Staf pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

hal tersebut, diperlukan juga upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas lahan.

3. **Kerjasama dan Pengelolaan.** Kerjasama ini dilakukan dengan multi-pihak dan dalam konteks tak terbatas sepanjang dalam kerangka pengembangan masyarakat.
4. **Pemantauan dan Evaluasi KPHK.** Proses ini mempertimbangkan prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan.

Memahami kelembagaan KPHK membawa pada diskusi tentang bagaimana membangun sinergi dengan perguruan tinggi, terutama ragam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dikembangkan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti adalah Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Dirjen Dikti melalui program MBKM nya merancang beberapa kegiatan yang sepenuhnya bisa diikuti oleh mahasiswa yaitu; ***membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, Studi/Proyek Independent, Kegiatan Wirausaha, Proyek Kemanusiaan, Penelitian/Riset, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Magang/Praktik Kerja, dan Pertukaran Pelajar***

Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai lembaga pendidikan tinggi senantiasa berbenah menyongsong setiap pembaruan yang terjadi. Salah satunya adalah merespons lahirnya kebijakan MBKM melalui penerbitan Kurikulum 2020 (K2020). Desain kurikulum yang dikembangkan oleh IPB terdiri dari empat kluster yakni;

1. **Mobilitas dan Pengembangan Kompetensi (mobility program),** dengan kegiatan:
 - a. Summer course dan konferensi/seminar nasional/internasional.
 - b. Pelatihan dan uji kompetensi.
 - c. Magang jangka pendek (short term internship).
2. **Kompetisi/Lomba (nasional dan internasional),** dengan kegiatan:
 - a. Kompetisi nasional maupun internasional.
 - b. Proyek/studi independen.
3. **Minat Bakat dan Pengabdian kepada Masyarakat,** dengan kegiatan:
 - a. Pengembangan minat bakat seperti olahraga, seni, pecinta alam, pramuka, dan sebagainya yang diwadahi melalui Unit Kegiatan Mahasiswa atau organisasi sejenis.
 - b. Pengabdian kepada masyarakat seperti bina desa, asistensi mengajar, kegiatan kemanusiaan.
4. **Kewirausahaan dan Kepemimpinan,** dengan kegiatan:
 - a. Kewirausahaan seperti program mahasiswa wirausaha, pengembangan startup, magang wirausaha dan sebagainya.
 - b. Organisasi Kemahasiswaan/Kepanitiaan seperti menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus dan kepanitiaan dalam berbagai event.
 - c. Talent Pool seperti pembinaan asrama kepemimpinan, pembinaan mahasiswa berprestasi, duta IPB dan sebagainya.

Terkait hal tersebut, maka upaya perguruan tinggi untuk mensinkronisasi hal tersebut dilakukan melalui dua langkah utama, yaitu merumuskan langkah strategis perguruan tinggi sekaligus menjaring kerjasama mitra untuk dukungan pencapaian Learning Outcomes (LO). Upaya untuk merumuskan langkah strategis perguruan tinggi diantaranya adalah:

1. Menyusun LO PS. KPM dalam kerangka K2020
 - a. Mampu mengaplikasikan teori-teori/konsep
 - b. Mampu merancang, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi program-program
 - c. Mampu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan analisis informasi dan data
 - d. Memiliki sikap positif
2. Merumuskan Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Sementara itu, strategi awal untuk menjaring kerjasama mitra adalah mengidentifikasi mitra potensial dalam rangka mencapai Learning Outcomes (LO). Mitra potensial diantaranya adalah; lembaga internasional, institusi pemerintah, instansi swasta, dunia industri, LSM, kegiatan pemberdayaan komunitas, dan penguatan kelompok kerja akar rumput.

Kerjasama dapat dikembangkan melalui beberapa kegiatan. Berikut adalah potensi kerjasama yang dapat dilakukan diantaranya adalah;

- **Kegiatan magang.** Kegiatan magang ini dimaksudkan untuk mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sekaligus mengasah kemampuan hard skill/soft skill. Magang dapat dilakukan dalam jangka pendek (*short term internship*).
- **Kegiatan pengabdian pada masyarakat.** Peserta dapat terlibat langsung dalam merumuskan aksi pemberdayaan masyarakat, bahkan dapat serta dalam program KKNT dengan tujuan mengasah kemampuan identifikasi masalah bersama masyarakat, menggali potensi, meramu solusi, dsb
- **Kegiatan wirausaha.** Kegiatan ini ditujukan untuk melatih mahasiswa dalam mengembangkan program wirausaha mahasiswa melalui misalnya pengembangan startup, melakukan magang wirausaha, dsb.
- **Kegiatan penelitian/riset.** Fokus kegiatan ini terutama untuk membangun cara berpikir kritis, mampu merumuskan permasalahan penelitian, dan menyusun metode riset.
- **Kegiatan studi/proyek independen.** Mengembangkan produk inovatif dan menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) merupakan contoh kegiatan yang bisa dilakukan.

Beranjak pada kawasan dimana KPHK Pati Barat bertanggung jawab atasnya, maka terlebih dahulu kita perlu memahami setting sosial di kawasan tersebut. Wilayah kerja KPHK Pati Barat berada di sekitar Gunung Clering, yang termasuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Donorojo. Berdasarkan agama yang dianut, penduduk kecamatan ini bisa disebut heterogen. Hal tersebut nampak dari data statistik rumah ibadah di daerah ini yaitu: surau 70 persen, mesjid 9 persen, gereja 19 persen, vihara 2 persen.

Proses pendidikan di Kecamatan Donorojo ditunjang dengan keberadaan fasilitas sekolah dari mulai Sekolah Dasar (44 buah) Sekolah Menengah Pertama (10 buah) hingga Sekolah Menengah Atas (5 buah) dan bahkan dilengkapi dengan keberadaan pondok pesantren (11 buah). Sebaran siswa di tiga jenjang pendidikan tersebut paling tinggi adalah murid SD 59%, disusul dengan murid SMP 26% dan murid SMA 15%.

Sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, ikatan warga terhadap hutan cenderung tinggi. Hal ini memicu konflik dengan KPH Pati Barat diantaranya ditemukannya usaha menggeser pal batas, menyerobot pal batas untuk kegiatan budidaya, pemanfaatan tumbuhan, perburuan liar, dll.

Dengan luas lahan yang terbatas, tidak banyak warga yang secara mandiri menggarap lahannya. Mayoritas pekerjaan mereka adalah buruh, *nemer*, dan bahkan exportir TKI. Desa terluas adalah Desa Banyumanis. Tetapi yang menarik adalah, Desa Tulakan luasnya sekitar 2/3 dari luas Desa Banyumanis tetapi jumlah kepala keluarga (KK) yang tinggal dua kali lipat lebih banyak. Fenomena serupa terjadi di Desa Sumberejo dimana jumlah luas lahan 25 persen dari Desa Banyumanis, namun jumlah KK lebih dari separuh jumlah KK di Desa Banyumanis. Hal ini barangkali menjadi indikasi bahwa di beberapa desa terdapat keterbatasan akses terhadap lahan.

Kegiatan terkait seni budaya lokal masih dipertahankan oleh penduduk kawasan ini. Ritual bersih desa merupakan kegiatan yang secara rutin dilakukan, juga kegiatan lain seperti tayub dan baku pukul. Satu hal yang juga menarik adalah masih kentalnya fenomena klenik. Sementara fenomena sosial yang juga dapat dianalisis adalah fenomena kawin kontrak, tingkat perceraian tinggi, dan maraknya poligami.

Merujuk pada fenomena di atas, penting untuk mendesain kegiatan yang bisa dilakukan oleh civitas akademika Departemen SKPM. Kegiatan tersebut seyogyanya disandingkan dengan mandatory KPHK seperti Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Singkronisasi mandatory KPHK dan Kerjasama PPM

Mandatory KPHK	Potensi Kegiatan Warga IPB (SKPM)
<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data potensi sumberdaya kawasan • Identifikasi perubahan kawasan • Penataan zonasi dan rencana pengelolaan • Perlindungan kawasan konservasi • Restorasi ekosistem • Identifikasi dan inventarisasi jasa lingkungan • Promosi potensi kawasan • Evaluasi kesesuaian fungsi kawasan • Prinsip keberlanjutan: ekologi-ekonomi-sosial • Membangun kesepahaman dengan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Magang di kantor KPHK Pati Barat • Menyusun peta sosial-ekonomi desa • Penelitian agroekosistem, transformasinya, dan livelihood system • Identifikasi daerah rawan bencana dan menyusun kegiatan mitigasi berbasis kearifan lokal • Membangun aktivitas ekonomi bersama masyarakat melalui promosi potensi ekowisata melalui media sosial • Mengembangkan produk olahan berbasis sumberdaya lokal • Penelitian sejarah aktivitas konservasi dalam bingkai sejarah lokal • Studi peran kepemimpinan lokal dalam konservasi • Pendampingan pengelolaan remiten kaum buruh migran

Melalui identifikasi kelembagaan dan kegiatan potensial, diharapkan terjalin sinergi kelembagaan dan aktivitas yang dapat bermuara pada dihasilkannya lulusan SKPM yang peka terhadap seting ekologi dan sosial sekitar.

Daftar Rujukan

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Institut Pertanian Bogor. 2021. Multiaktivitas Enrichment Coourse/Program K2020 dan Supporting Course K-2014
3. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi.
4. Purwandari, Heru. 2021. Peran Strategis Warga IPB: belajar Bersama Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan. Slide Presentasi. Disampaikan pada Webinar “Peluang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Adat Di KPHK PATI BARAT. Bogor, 22 Juli 2021
5. Santoso, Budi. 2021. Situasi Sosial Masyarakat di Sekitar Gunung Celering. Slide Presentasi. Disampaikan pada Webinar “Peluang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Adat Di KPHK PATI BARAT. Bogor, 22 Juli 2021